KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH LAMPUNG

SURAT TELEGRAM

DARI : KAPOLDA LAMPUNG

DERAJAT :KILAT
KLASIFIKASI :BIASA

KPD : DISTRIBUSI A-2 KMA B DAN C POLDA LAMPUNG

TEMBUSAN: KAPOLDA LAMPUNG

NO : ST/ 790 /IX/KEU./2026

TGL : 14 - 9 - 2026

AAA TTK REF TTK DUA

SATU TTK PERPRES NO 103 THN 2018 TTG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN POLRI TTK
DUA TTK PERKAP NOMOR 16 THN 2012 TTG MUTASI ANGGOTA POLRI TTK
TIGA TTK PERKAP NO 15 THN 2015 TTG TATA CARA PEMBERHENTIAN SEMENTARA DARI JABATAN DINAS POLRI TTK
EMPAT TTK PERKAP NO 2 THN 2016 TTG PENYELESAIAN PELANGGARAN DISIPLIN ANGGOTA POLRI TTK
LIMA TTK PERATURAN KAPOLRI NO 7 THN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN TUNKIN BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TTK

BBB TTK SEHUB DGN REF DI ATAS KMA BHW DLM RANGKA KETERTIBAN DAN DAN PENEGAKAN PERATURAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PADA ANGGOTA POLRI KHUSUSNYA POLDA LAMPUNG KMA MAKA DIPERINTAHKAN KPD SELURUH KASATKER/KASATWIL UTK MEMPEDOMANI DAN MELAKS KETENTUAN YG BERKAITAN DGN PEMBINAAN PEGAWAI DI LINGK POLRI BAIK PERATURAN TTG FUNGSI SDM KMA PROPAM DAN KEUANGAN TTK

CCC TTK BERKAITAN DGN HAL TSB KMA PENERAPAN PASAL 2 AYAT (2) PERKAP NOMOR 7 2020 YANG BERBUNYI " ***TUNJANGAN KINERJA DIBERIKAN KPD PEGAWAI DI LINGK POLRI YG BEKERJA SECARA PENUH DGN MEMPERHITUNGKAN KINERJA PEGAWAI KMA POLRI MENGGUNAKAN SISTEM MANAJEMEN KINERJA (SMK) SEDANGKAN PNS MENGGUNAKAN PENILAIAN PRESTASI KERJA (PPK)***" KMA MAKA SETIAP PENILAIAN KINERJA PEGAWAI DI LINGK POLRI SBGMN DIMAKSUD AYAT 2 HARUS MEMENUHI NILAI MINIMAL CUKUP TTK

DDD TTK.....

SURAT TELEGRAM KAPOLDA LAMPUNG
NO : ST/ 798 /IX/KEU./2026
TGL: 19 - 9 - 2026

DDD TTK PENERAPAN PASAL 5 AYAT (1) HURUF A PERKAP 7 THN 2020 BERBUNYI "***TUNJANGAN KINERJA TIDAK DIBERIKAN KPD PEGAWAI DI LINGKUNGAN POLRI YANG TIDAK MEMILIKI JABATAN TERTENTU DAN PASAL (2) BERBUNYI TIDAK MEMILIKI JABATAN TERTENTU SEBAGAIMANA DIMAKSUD PD AYAT (1) HURUF A KMA MERUPAKAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN POLRI YANG TIDAK MEMILIKI JABATAN STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL*** SEDANGKAN PENERAPAN PSL 5 AYAT (3) PERKAP 07 THN 2020 YANG BERBUNYI " ***DIBERHENTIKAN UNTUK SEMENTARA ATAU DINONAKTIFKAN DARI JABATAN DINAS POLRI SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT 1 HURUF B, MERUPAKAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN YANG DIBERHENTIKAN SEMENTARA ATAU DINONAKTIFKAN DARI JABATAN DINAS POLRI, APABILA DLM PROSES PEMERIKSAAN PELANGGARAN DISIPLIN, KODE ETIK DAN PIDANA***" KMA MAKA THDP ANGG YG DIDUGA MELAKUKAN PELANGGARAN DISIPLIN MAUPUN KODE ETIK DAN PIDANA KMA WAJIB MEMPERHATIKAN TTK DUA

SATU TTK PERKAP 2 THN 2016 PASAL 43 YANG BERBUNYI "***AYAT (1) ANGGOTA POLRI YANG BERDASARKAN BUKTI YANG CUKUP MELAKUKAN PELANGGARAN DISIPLIN DAPAT DIBERHENTIKAN SEMENTARA DARI JABATANNYA, TIDAK BOLEH DIMUTASIKAN, DAN MENGIKUTI PENDIDIKAN, SAMPAI ADANYA REKOMENDASI REHABILITASI AYAT (2) PEMBERHENTIAN SEMENTARA SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) DILAKSANAKAN MELALUI SIDANG DEWAN PERTIMBANGAN KARIER (DPK)"*** KMA BERDASARKAN PASAL TSB ANGG POLRI (GOL PAMEN KMA PAMA KMA BA DAN TA) YG SEDANG DIPERIKSA DLM DUGAAN PELANGGARAN DISIPLIN DAPAT DIBERHENTIKAN SEMENTARA DARI JABATANNYA DAN TIDAK DIBAYARKAN TUNKINNYA ATAU TIDAK DIBERHENTIKAN DR JABATANNYA DAN TETAP DIBAYARKAN TUNKINNYA BERDASARKAN HASIL SIDANG DPK TTK

DUA TTK PERKAP NOMOR 15 TAHUN 2015 SBB TTD DUA

AA TTK PASAL 4 YG BERBUNYI; "***AYAT (1) ANGGOTA POLRI DAPAT DIBERHENTIKAN SEMENTARA DARI JABATAN DINAS POLRI, APABILA TELAH DITETAPKAN SEBAGAI TERSANGKA / TERDAKWA TINDAK PIDANA, SEJAK DILAKUKAN PROSES PENYIDIKAN SAMPAI ADANYA PUTUSAN PENGADILAN YANG MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP"TTK***

BB TTK PASAL 6 YG BERBUNYI: ***PEMBERHENTIAN SEMENTARA DARI JABATAN DINAS POLRI YANG DITETAPKAN SEBAGAI***

TERSANGKA .....

TERSANGKA/TERDAKWA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 4 AYAT (1) DILAKSANAKAN SEBAGAI BERIKUT: A. ANKUM MEMINTA PENJELASAN SECARA TERTULIS KEPADA PENYIDIK PERIHAL STATUS HUKUM ANGGOTANYA YANG TERLIBAT DALAM TINDAK PIDANA; B. BERDASARKAN PEMBERITAHUAN DARI PENYIDIK, ANKUM MELAKSANAKAN SIDANG DEWAN PERTIMBANGAN KARIER (DPK) DENGAN PESERTA PENGEMBAN FUNGSI SDM, PENGEMBAN FUNGSI PENGAWASAN, PENGEMBAN FUNGSI PROPAM DAN PENGEMBAN FUNGSI HUKUM; C. ANKUM BERDASARKAN HASIL SIDANG DPK MENERBITKAN SURAT PERINTAH PEMBERHENTIAN SEMENTARA DARI JABATAN DINAS POLRI DAN MELAPORKAN KEPADA PEJABAT YANG BERWENANG PALING BLAMBAT 3 (TIGA) HARI SEJAK DITERBITKAN SURAT PERINTAH PEMBERHENTIAN SEMENTARA; DAN D. PEJABAT YANG BERWENANG MENERBITKAN SURAT KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA DARI JABATAN DINAS POLRI PALING LAMBAT 7 (TUJUH) HARI SEJAK DITERIMANYA LAPORAN DARI ANKUM" KMA BERDASARKAN PASAL TSB ANGGOTA POLRI (GOL PAMEN KMA PAMA KMA BA DAN TA) YG SEDANG DIPERIKSA DLM DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK POLRI DAPAT DIBERHENTIKAN SEMENTARA DARI JABATANNYA DAN TIDAK DIBAYARKAN TUNKINNYA ATAU TIDAK DIBERHENTIKAN DARI JABATANNYA DAN TETAP DIBAYARKAN TUNKINNYA BERDASARKAN HASIL SIDANG DPK TTK

TIGA TTK PERKAP 2 THN 2016 PASAL 69 YG BERBUNYI ***"PASAL 69 (1) PELAKSANAAN HUKUMAN DISIPLIN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 33 HURUF E BERLAKU SEJAK TANGGAL DITETAPKAN OLEH ANKUM ATAU ATASAN ANKUM DENGAN PUTUSAN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP. (2) PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP ANGGOTA POLRI DILAKUKAN OLEH ANKUM YANG PELAKSANAAN SEHARI-HARI DITUGASKAN KEPADA PROVOS POLRI ATAU PENGEMBAN FUNGSI SUMBER DAYA***

MANUSIA.....

SURAT TELEGRAM KAPOLDA LAMPUNG
NO : ST/ 798 /IX/KEU./2026
TGL: 19 - 9 - 2026

MANUSIA POLRI; (3) PENGAWASAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (2) PADA SAAT; A. 6 (ENAM) BULAN SETELAH MENJALANI HUKUMAN; DAN B. MENJALANI HUKUMAN TTK" PASAL INI MENGATUR PENYELESAIAN HUKUMAN DISIPLIN MASA PENGAWASAN SAMPAI DENGAN REKOMENDASI PENILAIAN ANGGOTA YG MELAKUKAN PELANGGARAN DISIPLIN DAN MENJADI DASAR PEMBERIAN JABATAN BAGI ANGGOTA YG DIHUKUM PENCOPOTAN JABATAN/TDK MEMPUNYAI JABATAN TERTENTU MELALUI SIDANG DPK TTK

EEE TTK PEMBAYARAN TUNKIN SELAIN DIATUR PADA POINT AAA S.D POINT DDD AGAR MEMPEDOMANI SEPENUHNYA PERKAP 7 THN 2020 TTG PEMBAYARAN TUNKIN DI LINGK POLRI TTK

FFF TTK ST INI AGAR DIPEDOMANI DLM MEMBAYARKAN TUNKIN SESUAI ATURAN YG BERLAKU SEHINGGA ANGGOTA BERKINERJA LEBIH BAIK KMA DISIPLIN DAN DPT MEMINIMALISIR PELANGGARAN TTK

GGG TTK ST INI BERSIFAT JUKRAH UTK DILAKS TTK

HHH TTT DUM TTK HBS

AN KAPOLDA LAMPUNG
WAKA

Drs SUMARTO, M.Si
BRIGJEN POL